
**Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pt Boss Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Corporate Social Responsibility
(Studi Kasus: Desa Damakitang, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun)**

**Jesica Rodearni Sipayung¹, Artha Tobing², Vera A. Pasaribu³,
Jonson Rajagukguk⁴**

¹²³Universitas HKBP Nommensen Medan

jesica.rodearni@student.uhn.ac.id¹, artha.tobing@uhn.ac.id²
vera.pasaribu@uhn.ac.id³, jonson.rajagukguk@uhn.ac.id⁴

ABSTRACT

The lack of equitable regional development has resulted in low levels of community welfare. Therefore, collaboration between the local government and the private sector, particularly PT BOSS, is needed to work together in improving community welfare through community empowerment programs based on Corporate Social Responsibility (CSR). This study aims to determine the form of collaboration between the local government and PT BOSS in implementing CSR-based community empowerment programs for the people of Damakitang Village, viewed through the collaborative governance process proposed by Ansell and Gash. This study uses a qualitative research method through interviews and documentation. The results show that the collaboration between the local government and PT BOSS in implementing CSR-based community empowerment programs has been carried out well and has contributed to improving community welfare and independence after the implementation of the programs. Overall, no significant obstacles were found during the collaboration process.

Keyword: collaborative governance, community empowerment, corporate sosial responsibility.

ABSTRAK

Kurangnya pemerataan pembangunan daerah menjadikan kehidupan masyarakat kurang kesejahteraan, oleh karena ini diperlukannya kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta (PT BOSS) untuk berkerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis *corporate sosial responsibility*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis csr bagi masyarakat Desa Damakitang, yang dilihat menggunakan proses *collaborative governace* menurut Ansell & gash. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR ini telah

berjalan dengan baik, dan juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga kemandirian bagi masyarakat setelah program pemberdayaan masyarakat ini berjalan. Namun secara keseluruhan tidak ada hambatan yang besar ditemukan selama proses kolaborasi berlangsung.

Kata kunci: collaborative governance, pemberdayaan masyarakat, corporate sosial responsibility.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum terwujudnya pemerataan pembangunan daerah sehingga menuntut pemerintah daerah baik itu dari bupati, camat dan kepala desa untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dimana sebenarnya pembangunan daerah ini merupakan tugas utama dari pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup beberapa aspek seperti: aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat program pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang efektif untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. namun hasil yang diharapkan tidak terwujud, karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya yang sering kali menghambat pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kepada masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran dana pemerintah, sektor swasta memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Peran yang di dapat di wujudkan melalui konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah komitmen dari perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan swasta.

CSR atau lebih familiar dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana merupakan salah satu esensi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada lingkungan sosial dimana sebuah perusahaan berada (Raharjo et al., n.d.). Secara konseptual, definisi CSR dapat disimpulkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan keseimbangan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dimana perusahaan berada. Tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya merupakan tanggung jawab moral yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para *stakeholder* yang ada dalam perusahaan, komunitas atau masyarakat serta ekologi/lingkungan. Dengan demikian adanya sebuah perusahaan harus dapat memberikan dampak dan tanggung jawab sosial bagi *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Pada pelaksanaannya CSR diharapkan dapat memberikan perubahan dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

Pada zaman sekarang perusahaan swasta atau PT tidak lagi dipandang semata sebagai komunitas yang hanya mencari keuntungan ekonomi yang tinggi, tetapi

CSR perusahaan yang kini menjadi bagian integral dari praktik bisnis yang diharapkan mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Termasuk PT BOSS yang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Simalungun yaitu Kecamatan Silau Kahean, Desa Damakitang ini sudah menerapkan CSR. Salah satu bentuk kontribusi konkret antara PT BOSS dan Pemerintah Daerah adalah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi perusahaan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah ini. PT BOSS menerapkan CSR sebagai kewajiban moral dan legal yang harus diterapkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan program pemberdayaan masyarakat.

Hadirnya implementasi CSR memunculkan adanya kajian mendalam mengenai motivasi pelaksanaannya., yang dimana CSR dianggap sekedar sebagai niat baik padahal ini merupakan sebuah kewajiban perusahaan untuk menjalankan CSR karena ini merupakan kewajiban legal. Munculnya konsep Filantropi dalam CSR mampu menjadi landasan dalam melaksanakan kolaborasi. Filantropi merupakan tindakan kemanusiaan yang berlandaskan dengan kepedulian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain.

Dalam konteks CSR, filantropi diwujudkan melalui sumbangan dana, bantuan sosial, atau dukungan program pemberdayaan masyarakat, seperti yang sudah dilakukan oleh PT BOSS yang dimana perusahaan ini membantu masyarakat dengan membangun penampungan air kepada masyarakat agar mudah mengambil air sebagai sumber kebutuhan sehari-hari dan juga membantu masyarakat dengan memberikan bantuan memberikan pupuk kepada masyarakat yang bekerja sebagai petani. Dengan hadirnya CSR diharapkan mampu menjaga lingkungan, karena dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak ekosistem dan menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Dalam kolaborasi kerja sama ini, pemberdayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan CSR. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya terbaik untuk memperkuat kemampuan, kemandirian, nilai masyarakat melalui penyediaan akses ke sumber daya, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang relevan bagi masyarakat. Program ini akan sangat penting karena fokusnya adalah menciptakan perubahan yang baik. pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi CSR yang efektif untuk membangun kapasitas lokal sehingga masyarakat menjadi lebih aktif, partisipatif, dan mandiri dalam mengelola sumber daya dan peluangnya(Raharjo et al., n.d.). Tujuannya bukan hanya sekedar memberikan bantuan dana, melainkan akan menjadikan masyarakat dari sekedar penerima manfaat menjadi pelaku utama pembangunan. Dengan menempatkan program pemberdayaan masyarakat sebagai inti dari CSR oleh PT BOSS, kolaborasi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang hanya efisien dalam operasional, tetapi juga menjamin bahwa yang diberikan akan bersifat dinamis terhadap kekhasan masyarakat lokal dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Pembangunan daerah ini menuntut adanya sinergi baru dari berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak hanya semata-mata bergantung pada alokasi dana dari pemerintah daerah, melainkan harus melibatkan partisipatif dari sektor swasta. Dalam konteks ini, program CSR berfungsi sebagai instrument penting yang menjembatani kepentingan komersial korporasi dengan kewajiban sosial mereka. Perkembangan implementasi CSR di Indonesia menunjukkan pergeseran fokus, dari praktik pemberian bantuan sosial menuju program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan.

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah di kecamatan dan pihak PT BOSS dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR. Dengan menggunakan konsep Filantropi diharapkan mampu dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat yang dapat berguna bagi masyarakat untuk hidup lebih baik dan memanfaatkan program dengan jangka yang lebih panjang lagi.

Meskipun program pemberdayaan masyarakat ini didukung oleh CSR PT BOSS dan pemerintah daerah Kecamatan Silau Kahean dan telah berjalan selama beberapa tahun, terdapat pencapaian yang belum terwujud secara merata dalam menjangkau kelompok sasaran. Karena pemerintah daerah dan PT BOSS menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi saat menjalankan program CSR ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program CSR sangat dipengaruhi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan Perusahaan dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan kerja, bantuan fasilitas umum serta mendukung pendidikan dan kesehatan. Peneliti merasa penting untuk mengkaji bagaimana bentuk kolaborasi tersebut diterapkan dalam konteks yang berbeda. Terlebih lagi, masih terdapat perbedaan keberhasilan pelaksanaan program CSR di berbagai daerah, sehingga perlu dilakukan kajian untuk memahami faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan PT BOSS dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Corporate Social Responsibility*”

METODOLOGI

Menurut (Sugiono, 2013: 9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapannya, metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan

mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan. Penelitian ini dapat didefinisikan sebagai Upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik.

PEMBAHASAN

Collaborative Governance

Menurut KBBI Kolaborasi adalah kerja sama untuk membuat sesuatu. Definisi ini menekankan bahwa kolaborasi adalah suatu perbuatan atau kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Ansell & Gash (2008) menjelaskan konsep *collaborative governance* sebagai bentuk tata kelola kolaboratif yang menekankan pada kemitraan antara aktor negara dan non-negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan menurut (Zulaikhah, 2020:60) Kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi, diskusi, kompromi, Kerjasama yang berhubungan dengan individu, kelompok atau beberapa pihak lainnya, baik yang terlinat secara langsung maupun tidak langsung

Secara umum, kolaborasi adalah bentuk hubungan antar individu atau organisasi yang ingin saling berbagi, saling terlibat secara penuh, dan sepakat untuk melakukan tindakan bersama. Mereka saling berbagi informasi, sumber daya, manfaat, serta tanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkolaborasi. Seperti halnya Camarinhna-Matos dan Afsarmanesh yang menyampaikan dengan nada yang hampir sama, mereka berpendapat bahwa kolaborasi adalah sebuah proses di mana beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab dalam menjalankan sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi bersama-sama demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Sarifudin et al., 2023:1796).

Menurut Fairuza (2017) dalam (Sabaruddin et al., n.d.2024:50) mengatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu hal penting saat ini karena melalui kolaborasi, semua pihak yang terlibat bisa berkumpul dalam satu tempat untuk berbicara, memahami satu sama lain, membuat perjanjian bersama, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut (Ansel dan Gash, 2007:550-554) terdapat faktor yang mempengaruhi kolaborasi pemerintah yaitu:

- a) *Staring Condition* yang dapat dijelaskan melalui *Power Resources Knowledge Asymetries* (Ketidakseimbangan Kekuatan dan Sumber Daya), *Incentives for Participation* (Insentif untuk berpartisipasi) dan *Prehistory of Antagonism and Cooperation* (Sejarah konflik dan kerjasama sebelumnya)
- b) *Institutional Design*
- c) *Facilitative Leadership*

Proses Kolaborasi

Menurut (Ansell & Gash, 2007: 558) terdapat 5 proses tahapan kolaborasi:

1. *Face to Face dialogue*

Semua tata kelola kolaboratif dibangun di atas dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, "komunikasi mendalam" yang dimungkinkan oleh dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang bagi keuntungan bersama. Hal ini merupakan inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses tersebut. Kami berpendapat bahwa dialog tatap muka merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Misalnya, dialog tatap muka dapat memperkuat stereotip atau perbedaan status atau meningkatkan antagonisme dan rasa tidak hormat satu sama lain. Namun, sulit membayangkan kolaborasi yang efektif tanpa dialog tatap muka.

2. *Trust bullding*

Trust bullding atau membangun kepercayaan, dijelaskan bahwa kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan merupakan titik awal yang cukup umum dalam tata kelola kolaboratif, di mana pembangunan kepercayaan merupakan aspek yang paling penting dalam proses kolaborasi dan bisa jadi sangat sulit untuk ditumbuhkan. Oleh karena itu, pemimpin yang baik menyadari pentingnya membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Atau dapat dikatakan bahwa membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil dari proses kolaboratif.

3. *Commitmen to process*

Commitmen to process atau komitmen terhadap proses merupakan tingkat komitmen stakeholders untuk berkolaborasi adalah variabel penting dalam menjelaskan suatu kolaborasi yang dapat mengarah pada keberhasilan atau kegagalan. Komitmen para *stakeholders* sendiri merupakan faktor utama dalam memfasilitasi kolaborasi. Komitmen memiliki hubungan yang erat dengan motivasi para stakeholders untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan yang saling menguntungkan, yang dapat menjadi cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.

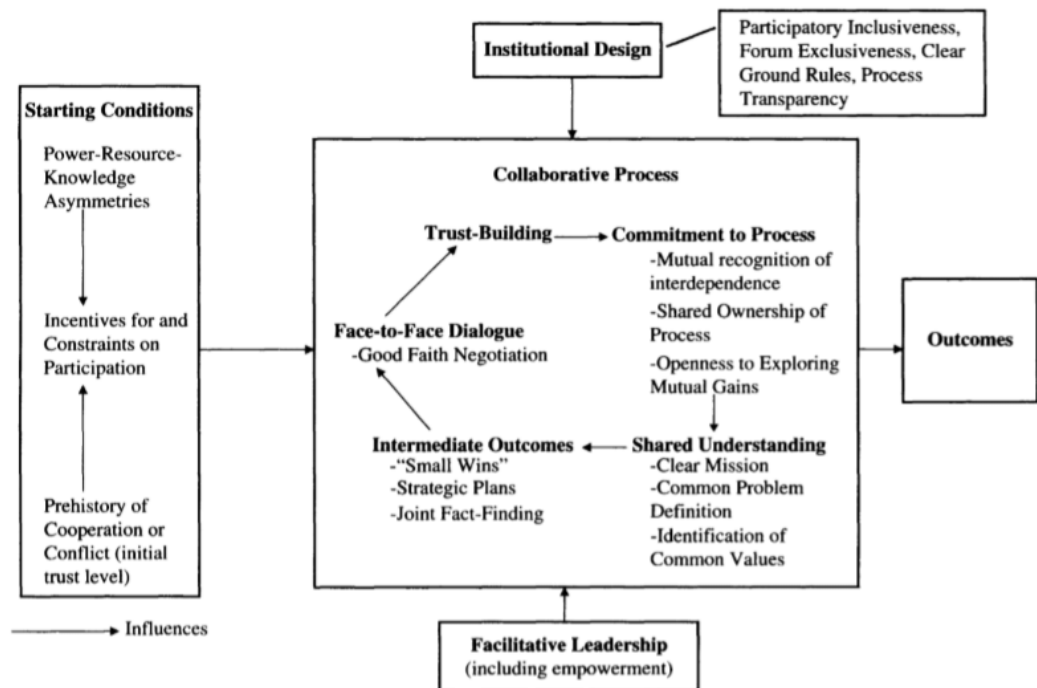
4. *Shared understanding*

Shared understanding atau pemahaman bersama merupakan suatu saat tertentu dalam proses kolaborasi di antara para pemangku kepentingan harus membangun pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai misi bersama, kesamaan, tujuan bersama, visi bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah dan strategi yang jelas, serta keselarasan nilai-nilai kolaborasi.

5. *Intermediate outcome*

Intermediate outcome atau hasil menjelaskan bahwa kolaborasi terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan dalam kolaborasi relatif konkret tercapai, serta dapat menghasilkan "kemenangan kecil" dalam kolaborasi tersebut. Hasil antara dapat mewakili hasil yang nyata dalam kolaborasi, namun juga dapat dianggap sebagai hasil dari proses kritis yang sangat penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses. Kemenangan kecil ini dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaborasi, serta mendorong pembangunan kepercayaan dan komitmen.

Gambar 1: Proses Kolaborasi Ansell & Gash



Model Collaborative Governance

Menurut (Ansell & Gash, 2007:550) terdapat 5 model *Collaborative Governance*:

1. *Starting condition* yang merupakan tahapan dalam menjelaskan dua isu penting yaitu ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dan insentif agar berpartisipasi. Apabila sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan tidak seimbang, maka kerjasama akan dimanipulasi oleh pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang lebih banyak. Oleh karena itu, jika hal tersebut terjadi, maka harus ada komitmen untuk membantu pemangku kepentingan yang lemah. Hal lain yang tidak kalah penting adalah keharusan adanya insentif agar pemangku kepentingan yang lemah dapat gigih bergabung untuk bekerjasama. Dan

- terakhir, harus ada antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam kerjasama sehingga di awal harus dibangun rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya.
2. *Facilitative leadership* Atau memfasilitasi keberadaan kepemimpinan, Ansell dan Gash menjelaskan bahwa sebuah tahap dalam proses kolaborasi memerlukan fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh para aktor. Hal ini penting untuk mempertahankan stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan antar aktor, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan di antara para aktor, dan memfasilitasi forum diskusi.
 3. *Institutional design* adalah aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.
 4. *Collaborative process* bahwa dalam membangun tahapan kolaborasi yang dimulai dengan forum dialog tatap muka secara konsensus, bertujuan untuk menciptakan saling percaya di antara para aktor dan menumbuhkan tanggung jawab dalam menciptakan suasana yang mendukung kesepahaman bersama. Setelah itu terlaksana, tujuan akhir dari kolaborasi adalah menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang dihadapi.
 5. *Intermediate Outcomes* Proses kolaborasi dapat dianggap berhasil jika dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa kegiatan bersama dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan. Selanjutnya, tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama dan pencapaiannya dilakukan dengan cara yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya. Proses ini akan terus berjalan mengikuti alur kolaborasi yang telah disetujui. Meskipun hasil sementara telah berupa hasil yang nyata, proses yang menghasilkan dampak tersebut adalah esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan keberhasilan kolaborasi. Hasil sementara tidak dapat dianggap sebagai hasil akhir.

Ada pendapat dari beberapa ahli yang lain yang mengemukakan tentang kolaborasi salah satu nya adalah Thomson dan Perry(2006) dalam (Fairuza, 2019:4) mengatakab bahwa definisi kolaborasi sebagai proses dimana aktor yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negoisasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memberikan keputusan atas isu-isu yang membawa mereka dalam keharusan kebersamaan. Hal ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Sedangkan menurut Menurut Himmelman(2001) dalam (Saputra& Sudirman, 2024) kolaborasi merupakan bentuk hubungan antarpihak yang melibatkan pertukaran informasi untuk memperoleh manfaat bersama, penyesuaian aktivitas, berbagi sumber daya, serta upaya meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kolaborasi tidak hanya sebatas bekerja bersama, tetapi juga mencakup berbagi informasi, aktivitas, sumber daya, dan kemampuan.

Berdasarkan perbedaan di atas peneliti memilih menggunakan teori model *Collaborative Governance* dari Ansell & gash (2008) karena model tersebut

sesuai dengan fokus penelitian yang dimana penelitian ini akan melihat proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR dan juga menekankan hubungan interaksi antara dua aktor dalam sebuah kolaborasi melalui face to face dialog, trust building, commitment to proses, shared understanding dan intermediate outcomes.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk menambah dan memperkuat kemampuan individu dan kolektif dalam masyarakat untuk mencapai otonomi yang ditingkatkan, mengelola potensi dan sumber daya yang melekat mereka, dan terlibat secara proaktif sebagai agen pembangunan. Upaya ini menekankan peningkatan kapasitas individu dan kolektif, termasuk pengembangan keterampilan, perolehan pengetahuan, dan penguatan daya tawar, daripada hanya menawarkan dukungan sementara.

Menurut (Dewa, 2020:93) oleh Pemberdayaan merupakan hasil dari inisiatif pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dapat digambarkan dalam dua cara yang berbeda, khususnya sebagai pemberdayaan individu dan pemberdayaan masyarakat. Menurut (Dewa, 2020:93) pemberdayaan masyarakat menunjukkan korelasi yang signifikan dengan pembangunan berkelanjutan, yang mengharuskan ketekunan otonomi individu dalam kerangka ekologis, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang. Pemberdayaan masyarakat melampaui hanya menangani persyaratan mendasar masyarakat, alih-alih mewakili upaya bersama untuk mengidentifikasi alternatif yang kondusif bagi kemajuan ekonomi lokal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan kemajuan dan transformasi bangsa di masa depan, terutama ketika berkaitan dengan kapasitas masyarakat yang tetap tidak cukup dalam menghalangi lintasan pembangunan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dan peningkatan otonomi dalam struktur masyarakat; dalam konteks ini, pemberdayaan dapat ditafsirkan sebagai inisiatif bersama yang bertujuan untuk menambah kompetensi individu dalam demografi yang kurang beruntung secara ekonomi untuk terlibat, bernegosiasi, dan mengarahkan pengaruh dan tata kelola atas institusi mereka dengan cara yang akuntabel dan kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Siagian, 2022:73)

Berdasarkan oleh teori dan konsep yang disebutkan di atas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan agensi individu dan kolektif yang secara ekonomi kurang beruntung, terpinggirkan, dan tanpa kekuasaan. Diantisipasi bahwa melalui proses pemberdayaan, kelompok masyarakat dapat naik ke strata sosial ekonomi menengah dan atas. Kemajuan semacam itu masuk akal hanya ketika kelompok-kelompok ini diberikan peluang, sumber daya, dan dukungan yang memadai dari para pemangku kepentingan yang terlibat dengan populasi miskin, terutama dalam konteks pedesaan, di mana fasilitasi proses pemberdayaan secara signifikan terhambat tanpa adanya bantuan dan infrastruktur yang diperlukan. (Siagian, 2022:74)

Menurut (Siagian, 2022:74) tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya di antara kelompok-kelompok terpinggirkan yang mengalami rasa ketidakberdayaan, yang mungkin timbul dari faktor internal (misalnya persepsi individu) serta faktor eksternal (misalnya penaklukan oleh kerangka sosial yang tidak adil).

Menurut Syaife (2009) dalam (Siagian, 2022:74) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk komunitas atau memperoleh kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi masyarakat lebih banyak pilihan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat melihat dan memilih sesuatu yang menguntungkannya.

Menurut Rukminto (2025) dalam (Siagian, 2022:75) terdapat 7 (tujuh) tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Tahap persiapan
2. Tahap pengakajian
3. Tahap perencanaan
4. Tahap pemformalisasi
5. Tahap pelaksanaan
6. Tahap evaluasi
7. Tahap terminasi

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najati, Agus Asmana, I Nyoman. Suryadiputra yaitu: (Ilmu et al., 2016:4)

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip yang paling penting untuk dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran posisi antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Namun, untuk mencapai tingkat tersebut, diperlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan menekankan penghargaan dan pengutamaan kemampuan masyarakat dibandingkan dengan bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan terbatas. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usaha mereka, memahami kondisi lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta mematuhi norma-norma masyarakat yang telah ada sejak lama.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang untuk berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Namun, secara bertahap dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2009:60) dalam (Nurhusn, Siti Aghnia, Syaefuddin, Lesi Oktiwanti, 2019) menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat masyarakat, terutama kelompok yang lemah yang mengalami ketidakberdayaan baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan transformasi sosial dalam masyarakat, di mana sikap dan perilaku masyarakat perlu diubah menuju sikap dan tindakan yang positif serta kreatif, serta mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak bergantung, sehingga menjadi masyarakat yang berdaya. Penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P adalah:

- a. **Pemukiman**
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. **Penguatan**
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.
- c. **Perlindungan**
Melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, serta menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang, apalagi yang tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah.
- d. **Penyokongan**
Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya.
- e. **Pemeliharaan**
Memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam Masyarakat.

Corporate Social Responsibility

Secara umum *Corporate Social Responsibility*, yang merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencakup komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (dikenal sebagai konsep *Triple Bottom Line* atau 3P: *Profit, Planet, People*). Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program ini juga dapat dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan di lingkungan atau masyarakat, seperti isu stunting, sehingga

tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut adalah melalui konsep filantropi. Konsep filantropi menjadi relevan dalam CSR karena sejalan dengan prinsip *Triple Bottom Line: (Profit, Planet, People)*

Konsep filantropi merupakan tindakan kemanusiaan yang berlandaskan pada kepedulian sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Filantropi menekankan pada nilai solidaritas, empati, dan keadilan sosial sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Filantropi dalam konteks CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan melalui sumbangan dana, bantuan sosial, serta dukungan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat. Filantropi menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat secara lebih luas (Dr. Azizul Kholis, S.E, M.Si, M.Pd, CMA, 2020). Definisi ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, serta komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan.(Muhtazib, 2023)

CSR merupakan tanggung jawab pengusaha untuk membuat suatu kebijakan, mengambil keputusan atau mengikuti tindakan yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Pengertian tersebut kemudian diperbarui oleh Davis yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan. Filantropi menjadi relevan dalam kerangka CSR karena sejalan dengan prinsip Triple Bottom Line (Profit, People, Planet), khususnya pada dimensi *people* dan *planet*, yang menekankan pentingnya kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, filantropi dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang memperkuat pelaksanaan CSR, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Konsep-konsep Corporate Social Responsibility

Dalam *Corporate Social Responsibility* konsep dan implementasi (Dr. Azizul Kholis, S.E, M.Si, M.Pd, CMA, 2020) terdapat 4 konsep :

1. *Corporate Social Responsibility* sebagai Kewajiban Sosial .

Pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh Bowen yang mendefinisikan CSR sebagai kebijakan yang harus dijalankan oleh pengusaha untuk

- menjalankan kewajibannya. Menurut Carroll, kewajiban sosial dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: (1) kewajiban ekonomi, (2) kewajiban hukum dan etika, (3) kewajiban filantropis.
2. *Corporate Social Responsibility* sebagai Kewajiban terhadap Pemangku Kepentingan.
Pihak- pihak tertentu disebut dengan pemangku kepentingan atau lebih dikenal dengan stakeholder. Pemangku kepentingan atau stakeholder dikelompokkan menjadi empat kelompok: (1) kelompok yang bersifat organisasi, (2) Masyarakat, (3) kelompok yang berhubungan dengan peraturan dan (4) media massa
 3. *Corporate Social Responsibility* sebagai dorongan etika
Beberapa ahli mengemukakan pandangan yang berlandaskan etika terhadap CSR yang menilai baik buruknya suatu perusahaan bukan berdasarkan kewajiban sosial terhadap pemangku kepentingan.
 4. *Corporate* sebagai Proses Manajerial
Sejumlah pakar menjelaskan CSR dengan menggunakan proses organisasi yang konkrit dan seringkali disebut dengan *Corporate Social Responsiveness*.

Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:92) dalam (Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, 2020) terdapat 5 prinsip yaitu:

1. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama.
Perusahaan mampu memberikan kontribusi sosial terbesar jika menemukan tantangan dari kebijakan yang penting dan sudah berlangsung lama serta berpartisipasi dalam jangka Panjang.
2. Mengontribusikan yang telah dilakukan.
Perusahaan memaksimalkan manfaat dan dukungan perusahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta memberikan produk dan jasa yang didasarkan pada kemampuan yang digunakan dalam menghasilkan operasi normalnya.
3. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar.
Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan dukungan khusus kepada usaha koperasi berskala besar.
4. Menimbang pengaruh pemerintah.
Dukungan pemerintah bagi perusahaan dalam program CSR atau paling tidak untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan dukungan positif.
5. Menyusun dan menilai total paket manfaat.
Perusahaan mendapatkan manfaat terbesar dari kontribusi sosial jika memberikan harga pada total paket manfaat.

Manfaat Corporate Social Responsibility

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan, baik bagi perusahaan, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Wibisono (2007) dalam (Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, 2020) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diantaranya:

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diterima perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan menjadi tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapat citra yang positif bagi masyarakat luas, yang kedua, perusahaan perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal, yang ketiga, perusahaan mampu mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan Keputusan yang baik.
2. Bagi Masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah adanya eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam.
4. Bagi negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kolaborasi pemerintah desa dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis *corporate sosial responsibility* di Desa Damakitang, Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun. Peneliti telah menemukan data yang dianggap cukup untuk menjelaskan bahwa kolaborasi pemerintah desa dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR ini berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala hambatan yang besar.

Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR terjadi dalam bidang sosial, ekonomi dan Kesehatan, seperti pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang rutin, pemberian bantuan pupuk dan bibit kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian, penyediaan ambulans gratis kepada masyarakat, perbaikan jalan untuk menunjang sistem perekonomian masyarakat serta penyediaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar PT BOSS. Dalam ini dilihat melalui *Collaborative Governace* menurut Ansell & Gash ditinjau melalui proses: *face to face dialog, trust building, commitmen to proses, shared understanding, dan intermediate outcome*.

1. Face to face dialog

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi secara langsung menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan antara pemerintah daerah dan PT BOSS. Komunikasi tersebut dilakukan untuk membicarakan kebutuhan masyarakat, menyampaikan permasalahan yang dihadapi, serta menentukan bentuk program yang akan diberikan.

Temuan ini sesuai dengan konsep *face-to-face dialogue* Ansell & Gash yang menempatkan dialog langsung sebagai awal penting dalam proses kolaborasi. Melalui dialog secara langsung, pihak-pihak yang terlibat dapat menyampaikan kepentingan masing-masing dan mencari kesepakatan bersama. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antara pemerintah dan PT BOSS membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Dengan demikian, *face-to-face dialogue* dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi proses untuk membangun kesepahaman mengenai program yang dibutuhkan masyarakat.

2. Trust building

Kepercayaan antara pemerintah daerah dan PT BOSS dibangun melalui komunikasi, koordinasi, serta pelaksanaan komitmen dalam menjalankan program CSR. Kepercayaan semakin terbentuk ketika program yang telah dibicarakan dapat direalisasikan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ansell & Gash bahwa *trust building* merupakan bagian penting dalam proses kolaborasi. Kolaborasi akan sulit berjalan apabila masing-masing pihak tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak lainnya. Dalam penelitian ini, pelaksanaan berbagai program CSR menjadi salah satu bentuk yang memperkuat kepercayaan karena menunjukkan adanya keseriusan PT BOSS dalam memenuhi komitmennya kepada masyarakat.

3. Commitmen to proses

Komitmen dalam proses kolaborasi terlihat dari kesediaan pemerintah dan PT BOSS untuk menjalankan peran masing-masing. PT BOSS memberikan dukungan melalui program CSR, sedangkan pemerintah membantu dalam mengoordinasikan dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program yang diberikan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Ansel dan Gash yang menjelaskan bahwa kolaborasi membutuhkan komitmen dari setiap pihak untuk terus terlibat dalam proses. Komitmen tidak hanya ditunjukkan melalui kesediaan untuk bekerja sama pada awal program, tetapi juga melalui keberlanjutan keterlibatan dalam pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, adanya berbagai program yang direalisasikan menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah menghasilkan tindakan nyata. Salah satu contohnya adalah penyediaan lowongan pekerjaan yang merupakan bagian dari komitmen PT BOSS kepada masyarakat sekitar.

4. Shared understanding

Shared understanding dalam penelitian ini terlihat dari adanya pemahaman bersama antara pemerintah dan PT BOSS mengenai kebutuhan masyarakat. Kedua pihak memahami bahwa keberadaan

perusahaan perlu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga program CSR diarahkan pada kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat.

Pemahaman bersama tersebut tercermin dalam jenis program yang dilaksanakan. Perbaikan jalan diarahkan untuk membantu akses masyarakat menuju lahan pertanian, pemberian pupuk dan bibit ditujukan untuk mendukung kegiatan pertanian, lowongan pekerjaan memberikan kesempatan peningkatan pendapatan, sedangkan ambulans gratis membantu masyarakat dalam memperoleh akses transportasi kesehatan.

Hal ini sesuai dengan teori Ansel & Gash bahwa *shared understanding* diperlukan agar pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki kesamaan mengenai masalah, tujuan, dan tindakan yang perlu dilakukan. Dengan adanya pemahaman bersama, program yang dilaksanakan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Intermediate outcome

Intermediate outcomes terlihat dari adanya hasil awal yang diperoleh selama proses kolaborasi. Hasil tersebut antara lain tersedianya kesempatan kerja, meningkatnya akses menuju lahan pertanian melalui perbaikan jalan, tersedianya dukungan pupuk dan bibit bagi petani, terbantunya kebutuhan masyarakat melalui sembako, serta tersedianya ambulans gratis.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan PT BOSS telah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam teori Ansel & Gash, *intermediate outcomes* merupakan hasil sementara yang muncul dari proses kolaborasi dan dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama selanjutnya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BOSS tidak berhenti pada komunikasi dan kesepakatan, tetapi telah menghasilkan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengenai kolaborasi Pemerintah Desa Damakitang dan PT BOSS dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di Desa Damakitang, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara kedua sektor telah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan berbagai bentuk pemberdayaan yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini bukan hanya ditunjukan melalui keterlibatan pemerintah desa dan perusahaan (PT BOSS) dalam pelaksanaan program tetapi juga melalui adanya komunikasi antar kedua sektor, kepercayaan, komitmen yang sama antara kedua pihak, kesamaan pemahaman atau tujuan dan juga tindakan nyata yang bertujuan pada kepentingan masyarakat.

Dilihat dari konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash proses kolaborasi antara pemerintah desa dan juga PT BOSS dapat dijelaskan melalui tahapan ini: *face to face*, *trust building*, *commitmen to proses*,

shared understanding, dan juga *intermediate outcome*. Secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Desa Damakitang dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR ini telah memenuhi unsur-unsur utama dari *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash. Keberhasilan kolaborasi ini di dukung oleh komunikasi langsung yang berjalan dengan baik, tumbuhnya kepercayaan, adanya komitmen bersama, kesamaan tujuan, dan juga menghasilkan tindakan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian kunci utama dari keberhasilan kolaborasi ini terletak pada kemampuan pemerintah desa dan PT BOSS dalam mendukung sumber daya dan juga kepentingan kebutuhan dari masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai wadah atau jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, sedangkan PT BOSS berkontribusi sebagai tempat penyedia sumber daya dan juga program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR yang mereka miliki. Namun keberlanjutan keberhasilan tersebut tetap bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk terus mempertahankan komunikasi, memperkuat partisipasi masyarakat, melalui evaluasi program dan juga pengembangan program berbasis CSR yang semakin berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Temuan penelitian juga memiliki hubungan dengan penelitian terdahulu mengenai kolaborasi pemerintah dan pihak swasta dalam program pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu mengenai kolaborasi pemerintah daerah dengan perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya menunjukkan bahwa keterlibatan pihak swasta melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal saja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada adanya keterlibatan pemerintah dan perusahaan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tidak hanya menjalankan kegiatan bisnis, tetapi turut memberikan kontribusi sosial melalui program CSR, sedangkan pemerintah berperan dalam menghubungkan program tersebut dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, penelitian ini memiliki kekhususan pada bentuk program CSR yang dilaksanakan PT BOSS, yaitu tidak hanya bantuan sosial, tetapi juga mencakup kesempatan kerja, perbaikan akses jalan menuju lahan pertanian, bantuan pupuk dan bibit, serta pelayanan ambulans gratis. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi pemerintah dan perusahaan dapat mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR telah berjalan melalui beberapa tahapan proses *Collaborative Governance* Ansell & Gash, yaitu dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menghasilkan capaian awal. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk proses kolaborasi.

Kekuatan utama kolaborasi dalam penelitian ini terlihat dari adanya komunikasi antara pemerintah dan PT BOSS, komitmen dalam melaksanakan program, serta hasil program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan PT BOSS melalui program CSR dapat menjadi salah satu sumber daya pendukung bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara pemerintah berperan penting dalam mengarahkan dan mengoordinasikan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan filantropi dapat dikatakan telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang lebih Tangguh dalam menghadapi kebutuhan dan permasalahan sosial serta mendorong masyarakat yang lebih mandiri melalui dukungan terhadap kegiatan ekonomi dan pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi pemerintah daerah dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BOSS merupakan bentuk kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, yaitu bantuan sembako, perbaikan jalan menuju lahan pertanian, penyediaan lowongan pekerjaan, pemberian pupuk dan bibit kepada masyarakat petani, serta pengadaan ambulans gratis.

Pelaksanaan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa CSR dari PT BOSS tidak hanya berbentuk bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung aspek ekonomi, infrastruktur, pertanian, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, proses kolaborasi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui lima unsur, yaitu face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes.

Pertama, *face-to-face dialogue*, Proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BOSS didukung oleh adanya komunikasi dan dialog secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Dialog tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, membahas permasalahan yang ada, serta menentukan bentuk program yang dapat dilaksanakan. Komunikasi secara langsung membantu pemerintah dan PT BOSS memperoleh pemahaman mengenai kondisi masyarakat sehingga program CSR yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, dialog langsung menjadi dasar penting dalam membangun hubungan kerja sama antara pemerintah dan PT BOSS.

Kedua, *trust building* atau pembangunan kepercayaan. Kepercayaan dalam kolaborasi terbentuk melalui komunikasi, koordinasi, keterbukaan, serta adanya pelaksanaan komitmen dari masing-masing pihak. Kepercayaan semakin terlihat ketika program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan berbagai program CSR menunjukkan adanya keseriusan PT BOSS dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sementara pemerintah turut berperan dalam mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan program. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting agar hubungan kerja sama dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Ketiga, *commitment to process* atau komitmen terhadap proses. Pemerintah daerah dan PT BOSS menunjukkan komitmen melalui keterlibatan masing-masing dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. PT BOSS memberikan dukungan melalui penyediaan berbagai program CSR, sedangkan pemerintah berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta

menghubungkan program dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut juga terlihat dari adanya upaya untuk merealisasikan program yang telah disepakati, termasuk penyediaan lowongan pekerjaan yang menjadi salah satu komitmen PT BOSS kepada masyarakat. Dengan adanya komitmen dari masing-masing pihak, proses kolaborasi dapat berjalan menuju tujuan bersama.

Keempat, *shared understanding* atau pemahaman bersama. Pemerintah daerah dan PT BOSS memiliki pemahaman bahwa keberadaan perusahaan di tengah masyarakat perlu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemahaman bersama tersebut tercermin dalam pemilihan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan jalan diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat menuju lahan pertanian, pemberian pupuk dan bibit ditujukan untuk mendukung kegiatan pertanian, penyediaan lowongan pekerjaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan, bantuan sembako membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan ambulans gratis memberikan kemudahan dalam memperoleh akses transportasi kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kelima, *intermediate outcomes* atau hasil sementara. Proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BOSS telah menghasilkan berbagai capaian yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat memperoleh manfaat berupa kesempatan kerja, akses jalan yang lebih baik menuju lahan pertanian, bantuan pupuk dan bibit, bantuan kebutuhan pokok, serta akses ambulans gratis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan secara formal, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk tindakan dan program yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Capaian tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat dan mengembangkan kolaborasi pada program-program berikutnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dan PT BOSS dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun keberlanjutan dan pengembangan program masih perlu diperkuat. Kolaborasi yang dilakukan telah menunjukkan adanya proses komunikasi, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, serta hasil nyata bagi masyarakat. Namun, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, program CSR dari PT BOSS perlu terus diarahkan dari pola bantuan yang bersifat jangka pendek menuju program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih besar,

kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BOSS diharapkan dapat menghasilkan program yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi serta kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Crasswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication, inc
- Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, C. (2020). *Corporate Social Responsibility konsep dan implementasi..* Ekonomic & Business Pub
- Siagian, N. (2022). *pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*. Malang Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Bandung Alfabeta.

JURNAL

- Dewa, I. (2020). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN*. 7(1), 91–107.
- Fairuza, M. (2019). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5, 1–13.
- Ilham, A., & Bonjol, S. I. (2024). Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan PT . Semesta Alam Barito Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah (CSR Studi Kasus). *Jurnal Administrasi Dan Pemerintah*, 2(1), 123–131. <https://doi.org/10.55850/japan.v1i1.72> |
- Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Farid, M., & Ap, M. (2016). (*STUDI BUMDes MAWAR DESA KEPEL , KECAMATAN NGETOS , KABUPATEN NGANJUK*) Syndi Dwi Purnamasari. 1–12.
- Maos, F. T., Jenek, M., Trianingrum, S., Arfidiandra, A. C., Tsani, F. A., & Fardian, F. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN CSR : PRAKTIK CSR PT PERTAMINA PATRA NIAGA FT MAOS DALAM

PROGRAM MERNEK JERNEK (Collaborative Governance in CSR : CSR Practices of PT Pertamina Patra Niaga. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR, Dan Pemberdayaan*, 7(1), 1–14.

Maos, F. T., Jenek, M., Trianingrum, S., Arfidiandra, A. C., Tsani, F. A., & Fardian, F. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN CSR : PRAKTIK CSR PT PERTAMINA PATRA NIAGA FT MAOS DALAM PROGRAM MERNEK JERNEK (Collaborative Governance in CSR : CSR Practices of PT Pertamina Patra Niaga. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR, Dan Pemberdayaan*, 7(1), 1–14.

Muhtazib, M. (2023). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan PT Hadji Kalla Cabang Sultan Alauddin Makassar besar . Hal ini menuntut perusahaan untuk beradaptasi agar bisa bertahan . Marketing sebagai terhadap masyarakat dan lingkungannya. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i1.1108>

Nurhusn, Siti Aghnia, Syaefuddin, Lesi Oktiawanti, lulu Y. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (uppk) 1,2,3,4. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(1), 6–18.

Raharjo, S. T., Resnawaty, R., Studi, P., Kesejahteraan, I., Ilmu, F., Politik, I., Csr, P. S., Sosial, K., & Padjadjaran, U. (n.d.). *Fungsi Corporate social responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 0042, 203–210. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20081>

Sabaruddin, A., Adnan, R., Sembilanbelas, U., Kolaka, N., & Wisata, O. (n.d.). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 7083, 48–61.

Saputra, E., & Sudirman, F. A. (2024). Studi Deskriptif Collaborative Governance di Wakatobi : Implikasi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Public Administration and Government*, 4(2), 256–269.

Sarifudin, A., Hude, D., & Sarnoto, A. Z. (2023). *Metode Kolaborasi dalam Supervisi Pendidikan Berbasis Al- Qur ' an*. 1793–1810. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.3636>

Wulandari, A. P., & Hadi, A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Desa dan PT STM dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 196–203.

Zulaikhah, S. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Rahtawu dalam Membentuk Wisata Berkelanjutan dan Bersaing Melalui Sistem Kolaborasi (Pemerintah*

dan Masyarakat) Siti Zulaikhah. 04, 57–70.